

**EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR BERSIH SUMBER  
PRODUKSI SEA WATER REVERSE OSMOSIS  
DI KECAMATAN BELAKANG PADANG  
TAHUN 2020**

**Zariyanti<sup>1</sup>, Nurhayati<sup>2</sup>, Dendi Sutarto<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

*zariyantiyamin79@gmail.com*

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

*nurhayati@fisip.unrika.ac.id*

<sup>3</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

*dendi\_sutarto@yahoo.co.id*

**Abstrak**

Pada penelitian ini membahas tentang evaluasi kebijakan pengelolaan air bersih sumber produksi Sea Water Reverse Osmosis di Kecamatan Belakang Padang Tahun 2020, penelitian ini mengkaji beberapa permasalahan tentang kebijakan pengelolaan air bersih sumber produksi Sea Water Reverse Osmosis yang dinilai tidak sejalan dengan kenyataan. Indikator pada penelitian ini menggunakan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu peneliti melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi dalam mengumpulkan data penelitian di lapangan. Hasil dari data yang dikumpulkan oleh peneliti akan diolah dan digambarkan atau dijelaskan secara deskriptif pada penelitian ini. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ditemukannya permasalahan yang menghambat kebijakan pengelolaan air bersih sumber produksi Sea Water Reverse Osmosis di Kecamatan Belakang Padang Tahun 2020 dilihat dari indikator efektivitas belum memenuhi kuantitas, kontinuitas dan tarif yang terjangkau, indikator efisiensi masih terdapat kekurangan tenaga pengelola dan biaya produksi yang mahal, indikator kecukupan masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana, indikator pemerataan belum meratanya pembangunan sarana dan prasarana, indikator responsivitas masih ada kritikan terkait tarif dan indikator ketepatan tidak sejalan dengan sasaran dan tujuan.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pengelolaan Air Bersih, *Sea Water Reverse Osmosis*.

**Abstrack**

*In this study, it discusses the evaluation of clean water management policies for production sources of Sea Water Reverse Osmosis in Belakang Padang District in 2020, this study examines several problems regarding the policy of managing clean water sources of production of Sea Water Reverse Osmosis which are considered not in line with expectations with reality. The indicators in this study use indicators of effectiveness, efficiency, adequacy, smoothness, responsiveness and accuracy. This research method is to use descriptive qualitative research methods, namely researchers conduct interviews, observation and documentation in collecting research data in the field. The results of the data collected by researchers will be processed and described or described descriptively in this study. The results of this study can be concluded that the finding of problems that hinder the policy of clean water management of production sources of Sea Water Reverse Osmosis in the Subdistrict of Behind Padang in 2020 is seen from the indicators of effectiveness that have not met the quantity, continuity and affordable rates, efficiency indicators are still lacking management personnel and production costs which is expensive, indicators of adequacy are still lacking in facilities and infrastructure, indicators of uneven distribution of facilities and*

*infrastructure development, indicators of responsiveness there are still criticisms related to tariffs and indicators of inconsistencies in targets and objectives.*

*Keywords: Policy Evaluation, Clean Water Management, Sea Water Reverse Osmosis.*

## PENDAHULUAN

Air adalah kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia karena segala aktivitas masyarakat di berbagai aspek kehidupan manapun memerlukan air bersih. Permasalahan ketersediaan air bersih bagi masyarakat menjadi masalah yang terus dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Meningkatnya aktivitas pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang disertai dengan pola hidup yang semakin menuntut penggunaan air yang berlebihan, berakibat pada peningkatan kebutuhan masyarakat akan air bersih.

Hak atas air bersih adalah hak asasi manusia. Kontrak sosial antara pemerintah dan warga negara dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat menjamin keberadaan air sebagai barang publik. Dan di dalam UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air (pasal 5) negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.

Kelangkaan dan kesulitan mendapatkan air bersih dan layak pakai menjadi permasalahan yang muncul di banyak tempat, salah satunya masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir pantai. Kesulitan yang dirasakan warga pesisir ini seperti ironi bagi Indonesia. Karena faktanya, Indonesia adalah bagian dari wilayah bumi yang tiga perempat dari permukaannya itu di tutupi dengan air. Indonesia termasuk negara yang kaya akan sumber daya alam. Indonesia memiliki laut yang lebih luas di banding daratannya, sehingga sangat penting bagi Indonesia untuk dapat memproses atau mengelola laut untuk kemakmuran rakyatnya.

Kecamatan Belakang Padang merupakan kecamatan *hinterland* yang menjadi bagian dari kawasan pesisir Kota Batam. Air Bersih di pulau Belakang Padang memang menjadi konsen tersendiri oleh Pemerintah karena walaupun masyarakat Belakang Padang sebenarnya sudah menikmati aliran air yang disalurkan DAM Sekanak Raya yang dibangun Pemerintah pada tahun 1999 dengan mengandalkan air yang bersumber dari waduk tadah hujan, namun ketersediaan air sangat terbatas. Warga harus rela bergiliran menerima aliran air bersih yang

di distribusi dengan pola sehari hidup dan tiga hari mati, itupun harus memasang tambahan pompa agar air mengalir kerumah mereka.

Mengatasi permasalahan air bersih di Kecamatan Belakang pemerintah melakukan salah satu langkah alternatif dengan pengolahan air laut dengan memanfaatkan laut sebagai bahan baku menggunakan teknologi Desalinasi yaitu proses pemisahan yang digunakan untuk mengurangi kandungan garam terlarut dari air garam hingga level tertentu sehingga air dapat digunakan. Instalasi *Sea Water Reverse Osmosis* dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam pada tahun 2016 dengan anggaran sebesar Rp 13,5 Miliar dan mulai dioperasikan pada tahun 2017.

Teknologi *Sea Water Reverse Osmosis* memang cukup mahal karena 70% operasionalnya menggunakan listrik sehingga biaya produksinya cukup besar. Imbasnya biaya yang dibebankan kemasyarakat pun menjadi mahal sekitar Rp 20.000/M3. Dengan melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat Belakang Padang sebagai nelayan tentunya tarif ini sangat membebankan. Satu bulan rata-rata pemakaian air bersih pada kelompok rumah tangga diperkirakan sekitar 15 M3, jadi diperkirakan masyarakat harus membayar sekitar Rp 350.000 per bulan. Jika dibandingkan dengan tarif air bersih yang bersumber dari waduk tadah hujan dengan harga dasar Rp 5.000 per kubik tentu cukup besar perbedaannya.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam pengelolaan air bersih sumber produksi *Sea Water Reverse Osmosis* yang awalnya di gadang mampu menyelesaikan permasalahan air bersih di Kecamatan Belakang Padang semata-mata hanya menjadi harapan bagi masyarakat. Krisis air bersih di kecamatan Belakang Padang belum bisa teratasi secara maksimal. *Sea Water Reverse Osmosis* yang sudah dibangun di Kecamatan Belakang Padang belum sanggup memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Belakang Padang apalagi saat musim kemarau.

## **METODELOGI**

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu ditujukan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih rinci terhadap suatu hal yang akan diteliti berdasarkan informasi dan pandangan yang diberikan oleh informan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang

diarahkan untuk memberi gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi daerah tertentu (Hardani, et al, 2020).

## PEMBAHASAN

### Efektivitas

William N Dunn menyatakan bahwa: “efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai tujuan dari diadakannya tindakan, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya”. Jika suatu kebijakan telah dilaksanakan namun ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat, maka bisa dikatakan kebijakan tersebut tidak berhasil.

Efektivitas dalam evaluasi kebijakan pengelolaan air bersih sumber produksi Sea Water Reverse Osmosis di Kecamatan Belakang Padang, peneliti menjadikan beberapa sub indikator dalam menilai terlaksananya indikator tersebut yaitu antara lain kualitas, kuantitas dan kontinuitas serta tarif air bersih sumber produksi Sea Water Reverse Osmosis.

#### a) Kualitas

Efektivitas pengelolaan air bersih ditentukan oleh kualitas air bersih. Kualitas air adalah tingkat kondisi kualitas air yang menunjukkan kondisi terkontaminasi atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan standar kualitas air yang ditetapkan. Berdasarkan hasil temuan dilapangan terhadap sampel air pada daerah penelitian bahwa air bersih yang dihasilkan sumber produksi Sea Water Reverse Osmosis tidak berbau, berwarna dan berasa serta pH yang dihasilkan sudah memenuhi standar kualitas air bersih yaitu pH 7,7 dan TDS 427 yang mana standar pH air bersih menurut Menteri Kesehatan adalah pH 6,5 sampai 8,5 sehingga air ini sudah layak dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kecamatan Belakang Padang.

#### b) Kuantitas

Persyaratan kuantitas dalam penyediaan air bersih adalah banyaknya air baku yang tersedia. Artinya air baku tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan daerah dan jumlah penduduk yang akan dilayani. Persyaratan kuantitas juga dapat ditinjau dari standar debit air bersih yang dialirkan ke konsumen sesuai dengan

jumlah kebutuhan air bersih. Standar kebutuhan air adalah kapasitas air yang dibutuhkan secara normal oleh manusia untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari. Keberhasilan sebuah kebijakan pengelolaan air bersih sumber produksi *Sea Water Reverse Osmosis* tidak lepas dari kuantitas air bersih yaitu tersedianya sumber daya air yang melimpah. Air yang melimpah ini harus dapat di distribusikan secara merata kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan didapat pengelolaan air bersih sumber produksi *Sea Water Reverse Osmosis* air bakunya sangat mudah didapat karena berasal dari air laut yang jumlahnya sangat melimpah sehingga bisa diproduksi setiap hari untuk memenuhi kebutuhan air bersih pelanggan, namun air baku yang melimpah saat ini belum dapat di didistribusikan kepada pelanggan dengan debit air sesuai kapasitas. Saat ini Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Bersih Kota Batam hanya mampu menghasilkan debit air setengah dari debit air seharusnya yaitu hanya 2,5 liter per/detik, hal ini dikeranakan keterbatasan mesin pompa produksi yang saat ini hanya berjumlah satu buah.

### c) Kontinuitas

Dalam penyediaan air bersih tidak hanya berhubungan dengan kualitas dan kuantitas tetapi dari segi kontinuitas juga harus mendukung. dimana air harus bisa tersedia secara terus menerus meskipun di musim kemarau. Karena tujuan utama dari perencanaan pengelolaan air bersih adalah agar kebutuhan masyarakat akan terpenuhi secara terus menerus walaupun musim kemarau. Kontinuitas dapat diartikan bahwa air bersih harus tersedia 24 jam per hari atau setiap saat diperlukan, kebutuhan air harus tersedia.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan kontinuitas air bersih sumber produksi *Sea Water Reverse Osmosis* untuk masyarakat Kecamatan Belakang Padang sangat fluktuatif tergantung pada perubahan musim. Jika musim penghujan pelanggan dapat menikmati air bersih secara terus menerus setiap hari walaupun dengan jam operasional yang tidak menentu. Namun ketika musim kemarau pelanggan hanya akan mendapatkan air bersih dengan giliran pada hari-hari tertentu sesuai jadwal pemadaman bergilir Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Bersih Kota Batam.

### d) Tarif

Pemerintah didalam memberikan pelayanan publik dituntut untuk tidak membebani masyarakat. Penetapan tarif tidak boleh membebani pelanggan namun mampu membiayai biaya operasional dan pemeliharaan. Berikut tarif air bersih sumber produksi *Sea Water Reverse Osmosis* yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tarif Jasa Layanan Air Bersih dan Air Produksi *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Bersih Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam:

Tabel 1  
Tarif Air Bersih Sea Water Reverse Osmosis

No	Kelompok Pelanggan	Blok Konsumsi (m3)	Tarif Per M3 (Rp.)
1	Kelompok I Sosial Hidra Umum, WC Umum, Rumah Ibadah	1 - 5	18.000
		6 - 10	19.800
		11 - 20	21.600
		21 - 30	23.400
		>30	25.200
2	Kelompok II Rumah Tangga Rumah Tangga Sangat Sederhana, Rumah Tangga Sederhana, Rumah Tangga Mewah	1 - 5	20.500
		6 - 10	22.550
		11 - 20	24.600
		21 - 30	26.650
		>30	28.700
3	Kelompok III Instansi Pemerintah Kantor Camat, Kantor Lurah, Kantor Imigrasi, Kantor Pos, Bea & Cukai, Kantor Polisi, Kantor Dinas Pendidikan atau Sekolah, Rumah sakit atau Puskesmas dan Kantor KUA	1 - 10	24.000
		11 - 20	26.400
		21 - 30	28.800
		>30	31.200
4	Kelompok IV Niaga Kios atau Warung, Toko atau Ruko, Kantor Perusahaan, Losmen, Penginapan, Hotel, Restoran serta Bengkel Besar	1 - 10	30.000
		11 - 20	33.000
		21 - 30	36.000
		>30	39.000
5	Kelompok V Pelabuhan Laut Non Kapal	1 - Dst	50.000
6	Kelompok VI Pelabuhan Laut Untuk Kapal	1 - Dst	100.000

Sumber: Profil Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Bersih Kota Batam, Tahun 2020

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa pemberlakuan tarif air bersih sumber produksi *Sea Water Reverse Osmosis* ditetapkan berdasarkan kelompok pelanggan yang dibagi dari kelompok sosial, rumah tangga, instansi pemerintah, niaga, pelabuhan laut non kapal dan pelabuhan laut untuk kapal. Tarif juga bersifat progresif yaitu pemberlakuan tarif sesuai dengan tingkat pemakaian air bersih artinya semakin besar pemakaian air, pelanggan akan membayar lebih tinggi.

Bedasarkan hasil temuan dilapangan didapat bahwa tarif air bersih sumber produksi *Sea Water Reverse Osmsis* di Kecamatan Belakang Padang masih membebani masyarakat. Banyak pelanggan yang mengeluh tarif air bersih ini karena dianggap kemahalan. Walaupun tarif air bersih sudah mendapat subsidi dari pemerintah yang seharusnya tarif Rp 50.000 per meter kubik menjadi Rp 20.500 per meter kubik namun nilai tarif ini hampir 4x lipat dari tarif air bersih dari waduk yang hanya RP 5.000 per meter kubik tentunya hal ini sangat tidak relevan dengan kondisi ekonomi sebagian masyarakat kecamatan Belakang Padang yang rata-rata sebagai nelayan. Seharusnya pengambil kebijakan dalam menentukan tarif harus berdasarkan kriteria ekonomi masyarakat karena fasilitas yang dibangun oleh negara tentunya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dan bukan menambah beban hidup masyarakat.

### **Efisiensi**

Wiliam N Dunn berpendapat bahwa Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Didalam mengukur efesiensi dalam penelitian ini peneliti menjadikan beberapa sub indikator dalam menilai terlaksananya indikator tersebut yaitu antara lain tersedianya tenaga dan biaya pengelolaan air bersih sumber produksi *Sea Water Reverse Osmosis*.

#### **a) Tenaga**

Pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital. Karena itu peran dan

fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Betapapun modern teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang profesional semuanya menjadi tidak berguna. Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan air bersih sumber produksi *Sea Water Reverse Osmosis* di kecamatan Belakang Padang, sumber daya manusia yang terlibat yaitu tenaga pengelola sebagai sumber daya atau aktor utama kebijakan. Berikut jumlah penempatan tenaga pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Bersih Kota Batam:

Tabel 2  
 Penempatan Bekerja Tenaga Pengelola

No	Unit	Jumlah		
		PNS	THL	Orang
1	UPT Air Bersih Belakang Padang	6		Orang
2	Tenaga ADM Belakang Padang		3	Orang
3	Unit Belakang Padang		9	Orang
4	Unit SWRO Belakang Padang		7	Orang
5	Unit Bulang Lintang		2	Orang
6	Unit Pemping		2	Orang
7	Unit Sembulang		1	Orang
8	Unit Pulau Abang		2	Orang
9	Unit Pulau Mecan		2	Orang
10	Unit Pulau Kasu		3	Orang
11	Unit Pulau Air Raja		2	Orang
12	Unit Pulau Terong		2	Orang
13	Unit Pulau Setokok		2	Orang
14	Unit Pecong		2	Orang
15	Unit Subang Mas		0	Orang
16	IKK Tiang Wangkung		2	Orang
17	IKK Pulau Lance		1	Orang
18	IKK Pulau Panjang		1	Orang
19	IKK Pulau Akar		1	Orang
20	IKK Pulau Buluh		0	Orang
Jumlah			50	Orang

Sumber: Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Bersih Kota Batam, Tahun 2020

Berdasarkan tabel 2 di atas terlihat bahwa jumlah penempatan tenaga pengelolaan air bersih sumber produksi *Sea Water Reverse Osmosis* di kecamatan Belakang Padang berjumlah 7 orang dengan status kepegawaian semuanya Tenaga Harian Lepas.

Dari hasil temuan dilapangan di dapat bahwa tenaga pengelolaan air bersih sumber produksi *Sea Water Reverse Osmosis* di Kecamatan Belakang Padang belum tercukupi baik

secara kuantitas (jumlah) maupun kualitas (keahlian) hal ini dirasa dapat mengganggu proses pengelolaan air bersih karena keterbatasan sumber daya yang hanya memiliki tenaga pengelola dengan status kepegawaian sebagai Tenaga Harian Lepas dan berpendidikan SMA yang tentunya tidak memiliki keahlian dan menguasai teknologi ini khususnya dibidang teknik dan kimia, sehingga pelaksanaan kebijakan tidak dapat berjalan secara efisien seperti apa yang diharapkan, saat terjadi kerusakan pada alat produksi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Kota Batam harus mendatangkan pihak ketiga atau tenaga teknis dari luar sehingga hal ini akan menggunakan anggaran yang lebih besar.

### b) Biaya

Biaya adalah suatu peristiwa yang diukur berdasarkan nilai uang yang timbul atau mungkin akan timbul untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Teknologi Sea Water Reverse Osmosis merupakan teknologi yang mahal karena membutuhkan listrik yang sangat besar, sehingga biaya produksi yang dikeluarkan dalam pengelolaan air bersih ini juga cukup besar. Berikut biaya pengeluaran dan penerimaan produksi *Sea Water Revere Osmosis*:

Tabel 3  
Biaya Pengeluaran SWRO 2018-2020

Tahun	Belanja SWRO (Rp)				
	Upah Honorarium	Bahan Kimia	Biaya Listrik	Biaya Pemeliharaan	Jumlah
2018	378.000.000	94.293.100	238.439.610	100.000.000	810.732.710
2019	384.000.000	182.873.500	268.969.410	114.000.000	949.842.91,
2020	402.000.000	132.384.395	297.435.692	114.000.000	945.820.087

Sumber: Buku Pdengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Bersih Kota Batam, Tahun 2020

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa jumlah pengeluaran biaya produksi SWRO setiap bulan berupa biaya upah honorarium, bahan kimia, biaya listrik, dan biaya pemeliharaan dengan jumlah pengeluaran yang setiap tahunnya tidak tetap. Untuk total pengeluaran selama setahun dari seluruh biaya produksi untuk tahun 2018 berjumlah Rp 810.732.710, tahun 2019 Rp 949.842.910, dan tahun 2020 berjumlah Rp 945.820.087.

Tabel 4  
Biaya Penerimaan SWRO 2018-2020

Tahun	Penerimaan SWRO	
2018	Rp	479.454.956
2019	Rp	791.874.954
2020	Rp	662.100.865

Sumber: Buku Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Bersih Kota Batam, Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan SWRO setiap bulan itu tidak tetap tergantung pemakaian pelanggan. Untuk total penerimaan selama setahun dari 763 SR untuk tahun 2018 berjumlah Rp 479.454.956, tahun 2019 Rp 791.874.954, dan tahun 2020 berjumlah Rp 662.810.0865.

Pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efisiensi pengelolaan air bersih sumber produksi *Sea Water Reverse Osmosis*. Dari besarnya biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan air bersih ini peneliti menilai hasil yang dicapai dari kebijakan ini tidak efisien, setiap bulan terjadi selisih antara pengeluaran dan penerimaan sehingga kebijakan ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya subsidi dari pemerintah. Seharusnya jika pemerintah ingin menerapkan suatu kebijakan sebaiknya dipikirkan dampaknya masyarakat karena dengan biaya produksi yang besar maka tarif yang akan dibebankan masyarakat juga akan mahal.

### Kecukupan

Kecukupan yang dalam konteks kebijakan publik dapat diartikan bahwa tujuan yang telah dicapai setelah pelaksanaan kebijakan tersebut dirasakan sudah dapat menyelesaikan masalah yang terdapat pada objek kebijakan tersebut. William N Dunn berpendapat bahwa kecukupan (*adequacy*) berarti seberapa jauh suatu efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

Sarana dan prasarana yang memadai merupakan penunjang keberhasilan suatu kebijakan. Sarana dan prasarana yang cukup menjadi modal bagi keberhasilan sebuah kebijakan. Berdasarkan hasil temuan dilapangan didapat bahwa belum tercukupinya sarana

dan prasarana pengelolaan air bersih sumber produksi *Sea Water Reverse Osmosis* di Kecamatan Belakang Padang. Masih kurangnya mesin pompa produksi dan jumlah reservoir mengakibatkan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Kota Batam belum dapat maksimal dalam memberikan pelayanan air bersih kepada pelanggan dan alat produksi yang berasal dari luar negeri membuat kebijakan ini banyak menemukan kendala saat melakukan pelayanan seperti jika terjadi kerusakan pada *sparepart* harus memesan dulu dari India dan Jerman dengan waktu pemesanan lumayan lama sehingga hal ini sangat mengganggu pelayanan air bersih kepada pelanggan.

### **Pemerataan**

Perataan dalam kebijakan dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan. William N Dunn menyatakan bahwa kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari pemerataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan didapat bahwa sampai saat ini kebijakan pengelolaan air bersih sumber produksi *Sea water Reverse Osmosis* di Kecamatan Belakang Padang belum merata dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah sehingga pembangunan sarana dan prasarana dilakukan secara bertahap. Saat ini belum meratanya pembangunan perpipaan pengaliran air bersih ke pemukiman warga dan reservoir untuk mengaliri perpipaan, sehingga hanya masyarakat yang rumahnya tersedia jalur perpipaan saja yang bisa menjadi pelanggan air bersih ini sedangkan masyarakat yang rumahnya belum tersedia jalur perpipaan belum bisa menjadi pelanggan air bersih ini.

### **Responsivitas**

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N Dunn responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat dilihat melalui tanggapan

masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Ditinjau dari hasil pengamatan yang peneliti dapat dilapangan bahwa kebijakan pengelolaan air bersih sumber produksi *Sea Water Reverse Osmosis* di Kecamatan Belakang Padang mendapat respon yang baik dari masyarakat karena dapat menjadi solusi didalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Walaupun masih ada nya kritikan oleh masyarakat terkait tarif air bersih ini yang dinilai masih mahal tentunya harapan masyarakat pemerintah dapat menurunkan tarif air bersih ini sehingga tarifnya terjangkau. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan air Bersih Kota Batam juga selalu merespon baik keluhan pelanggan serta senantiasa lebih mengedepankan kepentingan pelanggan dari pada yang lain.

### **Ketepatan**

William N Dunn menyatakan bahwa kelayakan (*appropriateness*) adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. kriteria kelayakan ini meyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrument untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ketepatan merupakan penilaian suatu tujuan dari sebuah kebijakan yang menjadi solusi dari masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga bisa dilihat apakah dapat memecahkan masalah tersebut atau justru menimbulkan masalah yang lain.

Suatu kebijakan dikatakan tepat ketika dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dan memberikan manfaat dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Kebijakan yang tepat dapat mendorong terwujudnya kebijakan publik yang berkualitas, dan dengan adanya kebijakan ada perubahan yang dialami oleh masyarakat. Di tinjau dari hasil yang didapat peneliti bahwa kebijakan pengelolaan air bersih *Sea Water Reverse Osmosis* di Kecamatan Belakang Padang saat ini belum tepat sasaran dikarenakan manfaat dari adanya kebijakan itu belum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hanya 40% saja masyarakat Belakang Padang yang bisa berlanggan air bersih ini sehingga saat musim kemarau masyarakat Belakang Padang masih kesulitan memperoleh air bersih.

## KESIMPULAN

### **Efektivitas**

Kebijakan pengelolaan air bersih sumber produksi *Sea Water Reverse Osmosis* di Kecamatan Belakang Padang dikatakan belum efektif

### **Efisiensi**

Kebijakan pengelolaan air bersih sumber produksi *Sea Water Reverse Osmosis* belum dikatakan efisien dikarenakan belum memiliki tenaga pengelola yang memadai

### **Kecukupan**

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Bersih Kota Batam saat ini masih belum memadai, perlu adanya penambahan sarana dan prasarana oleh pemerintah seperti penambahan mesin produksi dan reservoir sehingga bisa maksimal dalam pendistribusian air bersih kepada pelanggan dan bisa melakukan pengembangan jumlah berlangganan.

### **Pemerataan**

Kebijakan pengelolaan air bersih sumber produksi *Sea Water Reverse Osmosis* belum dirasakan adil dan merata oleh masyarakat Kecamatan Belakang Padang dikarenakan masih terbatasnya anggaran pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana seperti jalur perpipaan dan reservoir di setiap kampung.

### **Responsivitas**

Kebijakan pengelolaan air bersih sumber produksi *Sea Water Reverse Osmosis* di Kecamatan Belakang Padang mendapat respon yang baik oleh masyarakat dan pemerintah setempat dikarenakan dengan adanya kebijakan ini menjadi harapan masyarakat sebagai sumber air bersih selain waduk.

### **Ketepatan**

Kebijakan pengelolaan air bersih sumber produksi *Sea Water Reverse Osmosis* sudah tepat dilaksanakan di Belakang Padang karena air bakunya sangat mudah didapat dan menjadi sumber air bersih lainnya bagi masyarakat Belakang Padang yang dulunya hanya berharap dari waduk tadah hujan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hanafi, Imam. (2011). *Kebijakan Air Bersih Optimasi Manajemen Berbasis Permodelan*. Malang: UB Press.
- Hardani, et.al. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Profill Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Bersih Kota Batam Tahun 2020.
- Qodriyatun, Sri Nurhayati. (2015). *Penyediaan Air Bersih di Indonesia Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat* Yogyakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda
- Sutrisno, Totok. (2020). *Teknologi Penyediaan Air Bersih*. Jakarta: Rineka Cipta
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Yogyakarta: Caps.